PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS KARYA ILMIAH DOSEN: ANALISIS YURIDIS DALAM RANGKA PENINGKATAN REPUTASI AKADEMIK

Dharmawati, Sutriani Abubakar

Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo ; dharmawatiamma1234@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Ichsan Sidenreng Rappang ; sutrianisutri22@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas karya ilmiah dosen dengan peningkatan reputasi akademik institusi, studi kasus pada Universitas Ichsan Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari dokumen-dokumen publikasi ilmiah dosen serta regulasi terkait perlindungan HKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas ilmiah dosen tergolong tinggi, dengan 596 dokumen yang telah terindeks di berbagai platform seperti Scopus, Google Scholar, dan Garuda. Namun, hanya 10 karya yang terdaftar dan memperoleh perlindungan HKI. Kesenjangan ini mencerminkan lemahnya kesadaran hukum serta belum optimalnya dukungan kelembagaan dalam perlindungan hak cipta atas karya ilmiah. Padahal, perlindungan HKI memiliki korelasi langsung terhadap reputasi akademik institusi, baik dalam konteks akreditasi, pemeringkatan nasional maupun pengakuan internasional. Reputasi akademik yang kuat menuntut sistem yang menjamin keaslian, kualitas, dan kepemilikan hukum terhadap karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan internal, unit layanan HKI, dan strategi kelembagaan yang mendorong integrasi antara publikasi ilmiah dan sistem perlindungan HKI. Penelitian ini merekomendasikan perlunya langkah sistematis agar perlindungan HKI menjadi bagian integral dari pembangunan reputasi akademik di perguruan tinggi.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Karya Ilmiah, Reputasi Akademik, Pendidikan Tinggi

Abstract

This study aims to analyze the relationship between Intellectual Property Rights (IPR) protection for lecturers' scientific works and the improvement of the institution's academic reputation, a case study at Ichsan Sidenreng Rappang University. This study uses a normative legal approach by analyzing quantitative and qualitative data obtained from lecturers' scientific publication documents and regulations related to IPR protection. The results show that lecturers' scientific productivity is relatively high, with 596 documents indexed in various platforms such as Scopus, Google Scholar, and Garuda. However, only 10 works are registered and receive IPR protection. This gap reflects weak legal awareness and suboptimal institutional support for copyright protection for scientific works. In fact, IPR protection has a direct correlation with the institution's academic reputation, both in the context of accreditation, national rankings, and international recognition. A strong academic reputation requires a system that guarantees the authenticity, quality, and legal ownership of scientific works produced by lecturers. Therefore, internal policies, IPR service units, and institutional strategies are needed to encourage integration between scientific publications and the IPR protection system. This study recommends the need for systematic steps so that IPR protection becomes an integral part of building academic reputation in higher education.

Keywords: Intellectual Property, Copyright, Scientific Work, Academic Reputation, Higher Education

1. Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin pesat, peran dosen sebagai ujung tombak pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sangat strategis¹. Karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen bukan hanya merupakan wujud dari aktivitas akademik, tetapi juga aset intelektual yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan hukum yang tinggi. Melalui karya ilmiah, dosen berkontribusi dalam pembangunan nasional, pengembangan inovasi, dan peningkatan daya saing bangsa di kancah internasional². Namun, dalam kenyataannya, perlindungan terhadap karya-karya ilmiah ini masih kerap diabaikan, sehingga membuka celah bagi tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) seperti plagiarisme, pembajakan, dan penggunaan tanpa izin.

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual atas karya ilmiah dosen menjadi semakin penting untuk menjamin hak moral dan hak ekonomi pencipta³. Dalam konteks ini, sistem hukum nasional Indonesia telah menyediakan berbagai perangkat hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menjadi landasan utama dalam memberikan perlindungan terhadap karya ilmiah. Selain itu, keberadaan peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta berbagai kebijakan internal perguruan tinggi juga berkontribusi dalam upaya perlindungan tersebut. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap karya ilmiah dosen masih menghadapi tantangan serius, baik dari aspek kesadaran hukum, mekanisme pelaporan, hingga penyelesaian sengketa.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sendiri merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu atau badan hukum atas hasil ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam ranah akademik, karya ilmiah dosen, baik berupa artikel jurnal, buku ajar, modul, laporan penelitian, maupun paten, merupakan bentuk nyata dari ciptaan yang dilindungi hukum⁴. Oleh karena itu, keberadaan sistem perlindungan hukum terhadap HKI menjadi elemen penting dalam membangun ekosistem akademik yang sehat, adil, dan berorientasi pada

¹ Tining Haryanti, "7 Tantangan Dan Harapan Dosen Di Indonesia," 2025, 16.

² Mohammad Irfan Rosviana et al., "Peningkatan Kemampuan Dosen Bidang Penelitian Pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Iain Syekh Nurjati Cirebon Improving the Ability of Lecturers in the Field of Research at the Faculty of Education and Teaching Iain Syekh Nurjati Cirebon," *JTEM (Journal of Islamic Education Management)* 8, no. 1 (2024): 30.

³ Niru Anita Sinaga, "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020): 150.

⁴ Yoaneta Spiridiana et al., "Kedudukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Pendahuluan," *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 3 (2024): 385.

Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Karya Ilmiah Dosen: Analisis Yuridis Dalam Rangka Peningkatan Reputasi Akademik

mutu⁵. Selain melindungi hak pencipta, sistem ini juga berperan dalam membangun budaya apresiasi dan integritas akademik yang menjadi fondasi penting dalam peningkatan reputasi akademik institusi pendidikan tinggi.

Reputasi akademik merupakan indikator utama yang mencerminkan kualitas dan kredibilitas sebuah perguruan tinggi⁶. Salah satu aspek yang memengaruhi reputasi akademik adalah produktivitas dan orisinalitas karya ilmiah dosen. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap HKI atas karya ilmiah tidak hanya penting dari sisi perlindungan hak, tetapi juga dari sisi strategis, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan citra, akreditasi, dan pemeringkatan institusi pendidikan tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional⁷. Karya ilmiah yang diakui secara hukum dan didaftarkan sebagai kekayaan intelektual akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja lembaga, peningkatan angka kredit dosen, serta penguatan rekognisi akademik⁸.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak dosen yang belum memahami pentingnya perlindungan HKI terhadap karya ilmiahnya. Rendahnya tingkat pendaftaran hak cipta, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya fasilitasi dari lembaga pendidikan menjadi faktor penghambat utama dalam optimalisasi sistem perlindungan ini. Selain itu, masih ditemukan kasus plagiarisme dan penggunaan karya ilmiah tanpa atribusi yang jelas, baik di lingkungan akademik maupun di luar kampus. Situasi ini tentu sangat merugikan pencipta karya, melemahkan semangat inovasi, dan mencoreng integritas akademik secara umum.

Fakta ini juga tercermin pada Universitas Ichsan Sidenreng Rappang (UNISAN SIDRAP). Berdasarkan data publikasi yang tercatat hingga saat ini, Universitas ini memiliki capaian akademik yang cukup signifikan, yakni sebanyak 15 dokumen terindeks Scopus, 406 dokumen pada Google Scholar, dan 175 dokumen tercatat di platform Garuda. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 10 dokumen yang terdeteksi memiliki perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara resmi⁹.

⁵ B. Nainggolan, "Buku Ajar Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi." (Publika Global media, 2021), 56, <http://repository.uki.ac.id/13970/1/BukuAjarPerananHukumdalamPembangunanEkonomi.pdf>.

⁶ Aryo Bayu Wibisono, "Peran Desain Sistem Tanda (Sign System) Dalam Mendukung Reputasi Dan Kredibilitas Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Lingkup Perguruan Tinggi," *Gestalt: Jurnal Desain Komunikasi Visual* 6, no. 2 (2024): 98, <https://gestalt.upnjatim.ac.id/index.php/gestalt/article/view/136/6>.

⁷ G. A. P. Arrofach, "Penggunaan Chatgpt Dalam Pembuatan Karya Ilmiah Dosen Universitas Islam Indonesia Ditinjau Dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Maqāsid Syari'ah" (2024).

⁸ Maya Anas Taqiyah dan Atik Winanti, "Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Atas Tanah Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 5, no. 1 (2020): 79.

⁹ SINTA kemendikbud, "Universitas Ichsan Sidenreng Rappang," 2025,

Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Karya Ilmiah Dosen: Analisis Yuridis Dalam Rangka Peningkatan Reputasi Akademik

Ketimpangan antara jumlah karya ilmiah dan jumlah karya yang terlindungi menunjukkan bahwa masih terdapat celah besar dalam upaya perlindungan hukum atas karya intelektual para dosen. Hal ini menegaskan perlunya pembenahan dan penguatan sistem HKI di lingkungan kampus, termasuk pembinaan dosen untuk memahami dan memanfaatkan instrumen hukum yang telah disediakan negara.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur perlindungan HKI dan praktik implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang mendalam untuk mengkaji efektivitas peraturan yang ada, menilai kelemahan dalam pelaksanaan, serta merumuskan strategi peningkatan perlindungan HKI secara sistematis dan berkelanjutan. Analisis yuridis dalam konteks ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi norma-norma yang relevan, tetapi juga untuk memahami bagaimana hukum dapat dioperasionalkan secara efektif dalam dunia pendidikan tinggi.

Selain pendekatan yuridis normatif¹⁰, penting pula untuk memahami konteks sosial dan budaya dalam penerapan perlindungan HKI. Sebagian besar dosen di Indonesia masih menganggap karya ilmiah sebagai kontribusi sosial semata dan belum melihatnya sebagai aset hukum yang perlu dilindungi secara formal¹¹. Padahal, dalam sistem akademik yang kompetitif dan terukur, setiap karya ilmiah memiliki potensi untuk meningkatkan nilai tambah secara personal dan institusional. Hal ini menuntut adanya perubahan paradigma, baik di kalangan dosen maupun pengelola perguruan tinggi, agar lebih proaktif dalam melakukan pendaftaran hak cipta, memahami mekanisme perlindungan hukum, dan melakukan langkah-langkah preventif terhadap pelanggaran HKI.

Lebih lanjut, era digital juga membawa tantangan tersendiri dalam perlindungan HKI. Karya ilmiah yang dipublikasikan secara daring sangat rentan terhadap duplikasi, manipulasi, dan penyalahgunaan. Meskipun teknologi juga menawarkan alat pelacak plagiarisme dan sistem proteksi digital, namun tanpa kesadaran dan penegakan hukum yang kuat, teknologi tidak akan cukup untuk menjamin perlindungan yang menyeluruh. Oleh karena itu, perlu ada sinergi antara pendekatan regulatif, edukatif, dan teknologis dalam rangka memperkuat sistem perlindungan HKI atas karya ilmiah dosen. Dalam kerangka peningkatan reputasi akademik, perlindungan HKI bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana strategis. Dosen yang memiliki kesadaran akan pentingnya perlindungan karya ilmiah

<https://sinta.kemdikbud.go.id/affiliations/profile/8244297/?view=iprs>.

¹⁰ Muhamad Javier Ramzy et al., "LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL INVESTMENTS," *Jurnal Hukum Volgeist* 8, no. 2 (2024): 148-55, <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/volkgeist.v8i2>.

¹¹ Asriadi Darmawaty, Zainuddin, "Model for Fulfilling the Right to Work for Persons with Disabilities as an Effort to Protect the Law .," *Jurnal Hukum Volgeist* 9, no. 1 (2024): 1-7.

Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Karya Ilmiah Dosen: Analisis Yuridis Dalam Rangka Peningkatan Reputasi Akademik

cenderung lebih produktif, inovatif, dan kompetitif. Mereka terdorong untuk menghasilkan karya yang berkualitas dan orisinal karena merasa aman atas hak-hak yang dimilikinya. Di sisi lain, perguruan tinggi yang berhasil mengelola dan melindungi HKI dosennya akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk pengakuan nasional maupun internasional, peningkatan daya saing institusi, serta terciptanya budaya akademik yang sehat dan bermartabat.

Urgensi dari pembahasan ini semakin diperkuat oleh adanya berbagai kasus pelanggaran HKI di lingkungan perguruan tinggi yang mencuat ke publik, baik yang berkaitan dengan plagiarisme antar dosen, pengambilalihan ide penelitian tanpa izin, hingga penggunaan materi ajar tanpa mencantumkan penciptanya. Kasus-kasus tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian individual, tetapi juga berdampak sistemik terhadap citra lembaga dan kepercayaan publik terhadap dunia akademik. Oleh karena itu, pembentukan sistem perlindungan hukum yang tegas, adil, dan transparan menjadi keniscayaan dalam pembangunan dunia pendidikan tinggi yang bermutu dan berintegritas.

Sejalan dengan itu, kebijakan pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi perlu diarahkan untuk memperkuat mekanisme perlindungan dan penegakan HKI. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyediaan pusat HKI di setiap kampus, pelatihan hukum bagi dosen, integrasi edukasi HKI dalam kurikulum, serta peningkatan koordinasi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), dan perguruan tinggi. Di samping itu, perlu ada insentif bagi dosen yang mendaftarkan karya ilmiahnya sebagai hak cipta atau paten, serta pemberlakuan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran HKI yang terjadi di lingkungan akademik.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mekanisme perlindungan kekayaan intelektual atas karya ilmiah dosen di Indonesia, mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku, serta mengusulkan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memperkuat sistem perlindungan tersebut dalam rangka mendukung peningkatan reputasi akademik perguruan tinggi. Melalui pendekatan normatif dan deskriptif-analitis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dan praktis bagi pengembangan kebijakan perlindungan HKI yang responsif terhadap kebutuhan dunia akademik masa kini.

Akhirnya, kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh komunitas akademik. Tanpa perlindungan hukum yang efektif, karya ilmiah dosen akan terus berada dalam ancaman pelanggaran dan eksploitasi yang tidak adil. Maka, diperlukan langkah konkret dan terintegrasi agar hak-hak akademisi sebagai pencipta ilmu pengetahuan dapat terjamin, sehingga

reputasi akademik yang diharapkan dapat dibangun di atas fondasi yang kuat dan bermartabat.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif¹², yaitu suatu metode yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku¹³. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis aturan hukum, asas hukum, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual, khususnya terhadap karya ilmiah dosen dalam lingkungan pendidikan tinggi. Metode ini digunakan karena fokus penelitian adalah mengkaji bagaimana sistem hukum memberikan perlindungan terhadap hasil karya akademik dosen dan sejauh mana ketentuan perundang-undangan yang ada mampu menjamin hak-hak hukum atas ciptaan tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹⁴, pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁵, dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan untuk memahami konsep-konsep dasar mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, dalam ranah akademik dan hubungannya dengan reputasi institusi. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kondisi faktual terkait perlindungan HKI atas karya ilmiah dosen di Universitas Ichsan Sidenreng Rappang sebagai bagian dari studi reflektif atas praktik yang terjadi di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan

¹² Saharuddin Sahar et al., "Transfer of Land Rights in the Tayade System," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no. 1 (2025): 195–210, <https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.412>.

¹³ Saharuddin Saharuddin Hijrah Lahaling, Arhjayati Rahim, Sumiyati Beddu, Dzikra Ridha Dwi Aribah, "Legal Pluralism in the Tayade System: Reconciling Land and Plant Ownership Laws in Gorontalo," *Jurnal Ilmiah Al-Syir ' Ah* 23, no. 1 (2025): 1–17, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/jis.v23i1.3325>.

¹⁴ Ilham, "Law Enforcement Against Gorontalo City Police Area Gambling Crime In," *Indonesian Civil Law Review (ICLR)* 1 (2025): 1–17, <https://ejournal.mgpublishing.co.id/index.php/iclr/article/view/1/4>.

¹⁵ Eril Boli and Muh Nur Hidayat M, "Agrarian Law Reform in Indonesia : Between Legal Certainty and Social Justice," *Indonesian Civil Law Review (ICLR)* 1, no. 1 (2025): 53–68, <https://ejournal.mgpublishing.co.id/index.php/iclr/article/view/5/6>.

regulasi yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual dan pendidikan tinggi. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, buku, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen-dokumen akademik lainnya yang mendukung analisis hukum¹⁶. Penelusuran terhadap publikasi ilmiah dosen dilakukan melalui database seperti Scopus, Google Scholar, dan Garuda untuk mengetahui sejauh mana karya ilmiah dosen telah didaftarkan sebagai kekayaan intelektual dan mendapatkan perlindungan hukum.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan ketentuan hukum yang relevan dan membandingkannya dengan realitas praktik di lingkungan kampus. Analisis ini bertujuan untuk menemukan kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya¹⁷, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses perlindungan hak cipta atas karya ilmiah dosen, serta merumuskan solusi yang bersifat yuridis dan institusional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritik mengenai perlindungan kekayaan intelektual, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang dapat digunakan sebagai dasar penguatan kebijakan perlindungan HKI dalam rangka peningkatan reputasi akademik perguruan tinggi.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1. Produktivitas Ilmiah Dosen

Produktivitas ilmiah dosen merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja akademik di lingkungan perguruan tinggi. Produktivitas ini biasanya diukur melalui jumlah karya ilmiah yang dihasilkan dan dipublikasikan, baik dalam bentuk artikel jurnal, buku ajar, prosiding konferensi, maupun karya-karya lain yang relevan dengan bidang keilmuan masing-masing dosen¹⁸. Dalam konteks Universitas Ichsan Sidenreng Rappang (UNISAN SIDRAP), data menunjukkan bahwa dosen-dosen telah menunjukkan aktivitas publikasi yang cukup signifikan. Tercatat sebanyak 15 dokumen telah terindeks dalam Scopus, 406 dokumen di Google Scholar, dan 175 dokumen tercatat di platform Garuda¹⁹. Data ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif, terdapat upaya yang nyata dari civitas akademika untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui

¹⁶ Irmawati Nasadi and Suhartin I Akdaji, "The Dynamics of Marriage in the Modern Era : Between Tradition and State Law," *Indonesian Civil Law Review (ICLR)* 1, no. 1 (2025): 69-83.

¹⁷ Andi azizah Hastia, "Dari Klik Ke Kontrak : Pertimbangan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Online," *Indonesian Civil Law Review (ICLR)* 1, no. 1 (2025): 37-52.

¹⁸ Andi Ahmad Haekal, Derriawan Derriawan, and Zulkifli Zulkifli, "Pengaruh Kinerja Dan Karakteristik Individu Serta Lingkungan Institusi Terhadap Produktivitas Publikasi Ilmiah Guna Mendukung Reputasi Universitas," *Excellent* 8, no. 1 (2021): 33-50, <https://doi.org/10.36587/exc.v8i1.885>.

¹⁹ SINTA kemendikbud, "Universitas Ichsan Sidenreng Rappang."

*Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Karya Ilmiah Dosen: Analisis Yuridis
Dalam Rangka Peningkatan Reputasi Akademik*

media publikasi ilmiah.

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Publikasi Ilmiah Dosen dan Dokumen yang Memiliki HKI Universitas Ichsan Sidenreng Rappang

No	Sumber Publikasi	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen dengan HKI	Persentase Perlindungan (%)
1	Scopus	15	2	13,33%
2	Google Scholar	406	5	1,23%
3	Garuda	175	3	1,71%
	Total	596	10	1,68%

Sumber: Sinta Kemendikbud Universitas Ichsan Sidenreng Rappang

Keterangan:

- Jumlah dokumen pada kolom “Jumlah Dokumen dengan HKI” adalah estimasi distribusi berdasarkan total 10 dokumen yang terdeteksi memiliki perlindungan HKI.
- Persentase dihitung berdasarkan jumlah dokumen yang memiliki HKI dibandingkan total dokumen pada setiap platform.

Tingginya produktivitas publikasi ini tentu menjadi aspek yang positif bagi pengembangan reputasi akademik institusi. Dalam penilaian kinerja dosen, baik dari sisi kenaikan jabatan fungsional maupun dalam sistem akreditasi dan pemeringkatan kampus, kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah menjadi salah satu indikator yang sangat diperhitungkan. Hal ini menunjukkan bahwa dosen di UNISAN SIDRAP telah menjadikan aktivitas menulis dan meneliti sebagai bagian penting dari tugas tridharma perguruan tinggi.

Namun demikian, apabila ditelaah lebih jauh, produktivitas ilmiah yang tinggi belum sepenuhnya diiringi dengan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap karya-karya tersebut. Hal ini tampak dari perbandingan antara jumlah publikasi dan jumlah dokumen yang telah memperoleh perlindungan kekayaan intelektual (HKI)²⁰. Dari ratusan dokumen yang terpublikasi, hanya 10 dokumen yang terdeteksi secara resmi telah memiliki perlindungan HKI, khususnya dalam bentuk hak cipta. Fakta ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara produktivitas akademik dan perlindungan legal atas hasil karya tersebut.

Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius, sebab produktivitas ilmiah yang tidak disertai dengan perlindungan hukum dapat menimbulkan sejumlah risiko. Pertama, karya ilmiah yang tidak dilindungi rentan terhadap tindakan plagiarisme

²⁰ Darwance Darwance, Yokotani Yokotani, and Wenni Anggita, “Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2020): 193–208, <https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1998>.

Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Karya Ilmiah Dosen: Analisis Yuridis Dalam Rangka Peningkatan Reputasi Akademik

atau pembajakan oleh pihak lain. Kedua, dosen sebagai pencipta tidak akan mendapatkan manfaat ekonomi dan pengakuan hukum yang semestinya atas karya yang telah dihasilkannya. Ketiga, secara institusional, universitas akan kehilangan potensi nilai tambah yang bisa diperoleh dari kepemilikan aset intelektual, baik untuk keperluan akreditasi maupun pengembangan reputasi akademik.

Selain itu, rendahnya jumlah perlindungan HKI terhadap publikasi dosen juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem dukungan institusional. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya fasilitasi dari pihak universitas dalam proses pendaftaran HKI, minimnya sosialisasi mengenai pentingnya hak cipta, atau belum tersedianya regulasi internal yang mendorong setiap karya ilmiah untuk didaftarkan sebagai kekayaan intelektual. Akibatnya, meskipun dosen-dosen telah aktif menulis dan mempublikasikan karya, perlindungan hukumnya belum menjadi bagian integral dari proses akademik yang berlangsung.

Oleh karena itu, dalam upaya mendorong produktivitas ilmiah yang berkelanjutan dan bermutu, penting bagi Universitas Ichan Sidenreng Rappang untuk tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah publikasi, tetapi juga secara aktif membangun sistem perlindungan hukum atas hasil karya tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan unit layanan HKI di tingkat institusi, penyusunan pedoman internal mengenai pendaftaran hak cipta, pemberian insentif bagi dosen yang mendaftarkan HKI, serta integrasi kesadaran hukum dalam setiap proses publikasi ilmiah. Dengan demikian, produktivitas ilmiah dosen yang tinggi akan lebih bermakna dan bermanfaat apabila diiringi dengan sistem perlindungan hukum yang memadai. Kombinasi antara kuantitas publikasi dan perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya menjamin hak-hak dosen sebagai pencipta, tetapi juga memperkuat posisi perguruan tinggi dalam membangun reputasi akademik yang kredibel, berintegritas, dan kompetitif di tingkat nasional maupun global.

3.2. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas Karya Ilmiah

Perlindungan hukum terhadap karya ilmiah dosen dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta, merupakan bagian penting dalam menjamin hak moral dan hak ekonomi pencipta. Variabel ini bertujuan untuk menilai sejauh mana karya-karya ilmiah yang telah diproduksi oleh dosen memperoleh perlindungan hukum yang sah melalui mekanisme pendaftaran HKI. Dalam konteks Universitas Ichan Sidenreng Rappang, meskipun produktivitas publikasi tergolong tinggi dengan total 596 dokumen yang tersebar di berbagai platform seperti Scopus, Google Scholar, dan Garuda, namun hanya 10 dokumen yang terdeteksi telah memperoleh perlindungan HKI. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup tajam antara kuantitas karya ilmiah dan jumlah yang telah

Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Karya Ilmiah Dosen: Analisis Yuridis Dalam Rangka Peningkatan Reputasi Akademik

dilindungi secara hukum.

Perlindungan terhadap karya ilmiah sebagai objek HKI terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa karya tulis ilmiah merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta secara otomatis sejak ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Namun demikian, perlindungan yang bersifat otomatis tersebut seringkali tidak cukup kuat untuk melindungi pencipta apabila tidak disertai dengan pencatatan resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Tanpa pencatatan tersebut, pembuktian kepemilikan atas suatu karya akan menjadi lemah apabila terjadi sengketa hukum.

Selain Undang-Undang Hak Cipta, instrumen hukum lainnya yang relevan meliputi:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mewajibkan pengelolaan hasil penelitian termasuk dari sisi perlindungan HKI;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menempatkan penelitian dan publikasi sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen, yang mensyaratkan publikasi ilmiah sebagai bagian dari beban kerja dosen;
- Permenristek/BRIN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Manajemen Kekayaan Intelektual, yang secara eksplisit menekankan pentingnya manajemen kekayaan intelektual pada hasil penelitian dan publikasi dosen.

Perlindungan HKI juga berkaitan erat dengan sistem penjaminan mutu dan akreditasi institusi pendidikan tinggi. Dalam Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) dan Lembaga (IAPT) yang dikeluarkan oleh BAN-PT, karya ilmiah yang terdaftar sebagai HKI atau paten menjadi indikator penilaian kinerja dosen dan institusi. Oleh karena itu, keberadaan dokumen HKI tidak hanya penting untuk melindungi hak pencipta, tetapi juga strategis untuk peningkatan nilai akreditasi dan reputasi akademik.

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasinya di tingkat institusi masih menghadapi berbagai kendala. Minimnya jumlah dokumen yang memiliki HKI di Universitas Ichsan Sidenreng Rappang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Rendahnya kesadaran hukum dosen mengenai pentingnya mendaftarkan karya ilmiahnya sebagai HKI;

Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Karya Ilmiah Dosen: Analisis Yuridis Dalam Rangka Peningkatan Reputasi Akademik

- Tidak tersedianya unit layanan HKI di tingkat kampus yang secara aktif mendampingi proses pendaftaran;
- Keterbatasan informasi dan sosialisasi mengenai prosedur pendaftaran HKI di lingkungan akademik;
- Persepsi bahwa perlindungan hak cipta tidak mendesak, selama karya sudah dipublikasikan di jurnal atau platform daring.

Sebagian besar dosen masih menganggap bahwa publikasi karya ilmiah di jurnal sudah cukup untuk menjamin pengakuan dan perlindungan hukum, padahal dalam banyak kasus, pencatatan resmi melalui DJKI menjadi bukti paling kuat atas kepemilikan dan waktu penciptaan sebuah karya. Selain itu, sistem manajemen karya ilmiah yang tidak terintegrasi dengan database HKI juga menjadi tantangan tersendiri dalam mendeteksi secara otomatis karya mana yang telah atau belum memperoleh perlindungan.

Dalam konteks ini, perlu dilakukan langkah-langkah sistematis oleh pihak universitas, seperti:

- Membangun unit layanan HKI di bawah LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat);
- Menyusun pedoman internal pendaftaran HKI, termasuk integrasi dalam sistem pengusulan BKD dan kenaikan jabatan;
- Memberikan insentif kepada dosen yang mendaftarkan karya ilmiahnya sebagai HKI;
- Melakukan pelatihan dan pendampingan hukum mengenai proses pendaftaran HKI dan pemanfaatannya;
- Membangun kerja sama dengan DJKI, Kanwil Kemenkumham, dan konsultan HKI sebagai mitra strategis.

Perlindungan HKI yang optimal juga akan memperkuat posisi institusi dalam menghadapi potensi pelanggaran, baik dari pihak internal maupun eksternal. Dalam era digital, ketika karya mudah disalin dan disebarluaskan, maka pendaftaran HKI menjadi bentuk perlindungan hukum yang konkret dan preventif.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan, universitas juga sebaiknya membangun database internal HKI yang memuat karya-karya dosen yang telah terdaftar. Hal ini akan membantu dalam pelaporan kinerja institusi, baik dalam akreditasi maupun pelaporan ke Kemendikbudristek.

Dengan demikian, tingkat perlindungan HKI atas karya ilmiah dosen merupakan variabel krusial yang tidak dapat dipisahkan dari strategi pengembangan institusi berbasis mutu dan reputasi. Rendahnya angka perlindungan HKI di tengah produktivitas ilmiah yang tinggi mencerminkan masih

lemahnya kesadaran dan sistem pelindung di lingkungan akademik. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap karya ilmiah dosen harus ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan akademik dan manajemen perguruan tinggi.

3.3. Hubungan Antara Perlindungan HKI dan Reputasi Akademik Institusi

Dalam lanskap pendidikan tinggi saat ini, reputasi akademik suatu institusi bukan hanya ditentukan oleh kuantitas publikasi yang dihasilkan, tetapi juga oleh kualitas dan keaslian karya-karya ilmiah yang dipublikasikan. Semakin tinggi mutu, orisinalitas, dan pengakuan hukum terhadap karya ilmiah, maka semakin tinggi pula nilai dan posisi suatu institusi di mata publik, lembaga pemeringkatan, mitra kolaborasi, serta dalam sistem akreditasi. Dalam konteks ini, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta atas karya ilmiah, memainkan peran strategis dalam membentuk dan memperkuat reputasi akademik sebuah perguruan tinggi.

HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta atas hasil ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa perlindungan diberikan secara otomatis sejak karya diciptakan, namun pendaftaran resmi tetap dibutuhkan untuk memperkuat bukti hukum dan kepemilikan. Karya ilmiah dosen, baik berupa artikel, laporan penelitian, buku, modul, maupun karya terapan lainnya, merupakan objek yang dilindungi oleh hak cipta. Ketika karya tersebut tidak hanya dipublikasikan, tetapi juga didaftarkan sebagai HKI, maka ia menjadi bagian dari portofolio kekayaan intelektual yang memperkuat identitas akademik institusi.

Reputasi akademik, sebagaimana didefinisikan dalam berbagai instrumen pemeringkatan global seperti QS World University Rankings atau Times Higher Education (THE), mencakup penilaian terhadap kualitas publikasi, sitasi, kolaborasi penelitian, serta kontribusi terhadap inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satu indikator kuat yang menjadi sorotan dalam evaluasi reputasi adalah banyaknya karya ilmiah yang memperoleh perlindungan HKI dan atau paten. Sebuah institusi yang memiliki portofolio HKI yang kaya akan dianggap sebagai lembaga yang tidak hanya produktif dalam publikasi, tetapi juga mampu menciptakan karya-karya orisinal yang memiliki nilai tambah hukum dan ekonomi.

Dalam konteks nasional, sistem akreditasi yang digunakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), baik untuk program studi maupun institusi, juga menempatkan HKI sebagai indikator penting dalam penilaian capaian tridharma perguruan tinggi, terutama dalam aspek penelitian dan pengabdian. Demikian pula dalam sistem penilaian jabatan fungsional dosen dan beban kerja

Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Karya Ilmiah Dosen: Analisis Yuridis Dalam Rangka Peningkatan Reputasi Akademik

dosen (BKD), hasil karya ilmiah yang terdaftar sebagai HKI memiliki bobot tersendiri dalam penghitungan angka kredit. Oleh karena itu, keterkaitan antara perlindungan HKI dan reputasi institusi bukanlah asumsi, melainkan fakta struktural yang telah tertanam dalam sistem evaluasi akademik.

Sayangnya, hubungan strategis antara HKI dan reputasi akademik ini belum sepenuhnya disadari oleh banyak institusi pendidikan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta yang masih berkembang. Salah satu contohnya adalah Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, di mana data menunjukkan bahwa meskipun terdapat 596 karya ilmiah dosen yang telah terpublikasi di berbagai platform ilmiah seperti Scopus, Google Scholar, dan Garuda, hanya 10 dokumen yang secara resmi tercatat memiliki perlindungan HKI. Kesenjangan ini menandakan masih rendahnya kesadaran hukum akademik, serta belum optimalnya kebijakan dan sistem pendampingan internal dalam proses pendaftaran HKI.

Kurangnya perlindungan hukum terhadap karya ilmiah memiliki dampak langsung terhadap citra dan pengakuan institusi. Pertama, karya-karya yang tidak didaftarkan sebagai HKI lebih rentan mengalami plagiarisme, pencatutan, atau bahkan komersialisasi tanpa izin oleh pihak ketiga. Hal ini tidak hanya merugikan dosen sebagai pencipta, tetapi juga mencoreng nama baik institusi sebagai produsen ilmu pengetahuan. Kedua, lembaga pemeringkat maupun mitra kolaboratif internasional cenderung lebih menghargai institusi yang mampu menjamin keamanan dan keaslian karya ilmiahnya melalui perlindungan hukum. Ketiga, dalam kerangka akreditasi dan penilaian mutu, absennya dokumen HKI akan membuat institusi kehilangan poin yang semestinya bisa diperoleh dari hasil penelitian dan inovasi.

Selain itu, rendahnya jumlah HKI yang dimiliki oleh institusi juga mencerminkan lemahnya sistem manajemen riset dan inovasi. Institusi yang tidak memiliki regulasi atau unit layanan khusus yang menangani pendaftaran dan pengelolaan HKI umumnya akan mengalami stagnasi dalam pembangunan portofolio ilmiah. Padahal, keberadaan unit ini tidak hanya membantu proses administratif, tetapi juga menjadi katalis dalam membentuk budaya perlindungan hak atas karya intelektual. Dalam beberapa perguruan tinggi maju, unit HKI bahkan menjadi bagian dari pusat inovasi dan hilirisasi riset yang terhubung langsung dengan industri dan masyarakat.

Hubungan antara perlindungan HKI dan reputasi institusi juga dapat dilihat dari aspek kepercayaan publik. Ketika sebuah perguruan tinggi dikenal sebagai institusi yang menghargai dan melindungi karya intelektual dosennya, maka ia akan lebih dipercaya oleh masyarakat, mahasiswa, investor, dan mitra kerja sama. Reputasi ini akan menciptakan efek domino positif, seperti meningkatnya jumlah

Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Karya Ilmiah Dosen: Analisis Yuridis Dalam Rangka Peningkatan Reputasi Akademik

pendaftar mahasiswa baru, naiknya minat kerja sama penelitian dengan lembaga luar negeri, hingga peningkatan dana hibah dari pemerintah atau swasta.

Agar keterkaitan antara HKI dan reputasi institusi ini dapat dikembangkan secara optimal, diperlukan langkah strategis di tingkat institusional. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pembentukan Unit Layanan HKI dan Inovasi di bawah LPPM atau Biro Hukum Kampus
Unit ini bertugas sebagai pusat informasi, pendampingan, dan pengurusan pendaftaran HKI bagi dosen dan mahasiswa. Ia juga dapat berfungsi sebagai pusat pelaporan dan pelacakan status HKI institusi.
2. Penyusunan Kebijakan Internal tentang Perlindungan HKI
Misalnya, mewajibkan setiap hasil penelitian strategis atau yang didanai institusi untuk didaftarkan sebagai HKI sebelum dipublikasikan secara terbuka. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip *publish and protect*, bukan sekadar *publish or perish*.
3. Integrasi HKI dalam Penilaian Kinerja Dosen dan Kelembagaan
Pencapaian HKI dapat diberikan bobot khusus dalam evaluasi kinerja dosen, kenaikan jabatan, maupun tunjangan kinerja. Dengan demikian, dosen memiliki motivasi langsung untuk melindungi karya ilmiahnya secara hukum.
4. Sosialisasi dan Edukasi tentang HKI di Lingkungan Akademik
Pelatihan rutin, seminar, dan workshop mengenai pentingnya HKI dan cara pendaftarannya dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan sivitas akademika.
5. Pengembangan Basis Data Terbuka Portofolio HKI Institusi
Hal ini dapat menjadi etalase digital reputasi akademik universitas, sekaligus menjadi sumber informasi bagi pihak eksternal tentang kontribusi ilmiah dosen dan institusi.

Penting untuk diingat bahwa dalam era kompetisi global, perguruan tinggi tidak hanya bersaing dalam kuantitas lulusan atau jumlah jurnal, tetapi juga dalam hal pengakuan internasional terhadap karya-karya orisinal dan inovatif. Oleh karena itu, membangun reputasi akademik tanpa basis perlindungan hukum atas hasil kerja intelektual adalah sebuah kelemahan struktural.

Sebagai penutup, hubungan antara perlindungan HKI dan reputasi akademik bukanlah hubungan yang bersifat pasif atau sekunder. Sebaliknya, keduanya saling menguatkan dan bersifat kausal. Perlindungan HKI menciptakan legitimasi hukum atas karya ilmiah, mencegah plagiarisme, mendorong inovasi, dan memperkuat posisi institusi dalam sistem evaluasi dan pemeringkatan. Maka, bagi setiap

perguruan tinggi yang ingin berkembang dalam ekosistem pendidikan tinggi yang kompetitif, membangun sistem perlindungan HKI yang kuat bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan strategis.

4. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji hubungan antara perlindungan kekayaan intelektual atas karya ilmiah dosen dan upaya peningkatan reputasi akademik institusi, dengan studi kasus pada Universitas Ichsan Sidenreng Rappang. Berdasarkan data dan analisis terhadap tiga variabel utama yakni produktivitas ilmiah dosen, tingkat perlindungan HKI atas karya ilmiah, serta hubungan antara perlindungan HKI dan reputasi akademik institusi dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, dari sisi produktivitas ilmiah, dosen-dosen Universitas Ichsan Sidenreng Rappang telah menunjukkan tingkat aktivitas akademik yang cukup tinggi. Hal ini tercermin dari total 596 dokumen yang terindeks di berbagai pangkalan data, yakni 15 dokumen di Scopus, 406 di Google Scholar, dan 175 di Garuda. Jumlah ini mencerminkan keseriusan dan partisipasi aktif dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek penelitian dan publikasi. Namun, produktivitas ini tampaknya masih lebih berorientasi pada kuantitas, tanpa diiringi langkah sistematis untuk memperkuat aspek kualitas dan legalitas karya.

Kedua, ketika dikaitkan dengan tingkat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), ditemukan adanya kesenjangan yang cukup mencolok. Dari total ratusan karya ilmiah yang telah dipublikasikan, hanya 10 dokumen yang terdeteksi telah memperoleh perlindungan HKI, khususnya melalui pendaftaran hak cipta. Rendahnya angka ini menandakan masih lemahnya kesadaran hukum di kalangan dosen, belum optimalnya kebijakan institusional dalam mendukung pendaftaran HKI, serta belum tersedianya sistem layanan internal untuk perlindungan hak cipta secara menyeluruh. Padahal, perlindungan HKI sangat penting tidak hanya untuk melindungi hak moral dan ekonomi pencipta, tetapi juga untuk menjamin keaslian dan kredibilitas akademik dari karya tersebut. Ketiga, terdapat hubungan yang erat antara perlindungan HKI dan reputasi akademik institusi.

Sebuah perguruan tinggi yang mampu menunjukkan portofolio kekayaan intelektual yang kuat, orisinal, dan terlindungi secara hukum akan memiliki nilai lebih dalam sistem pemeringkatan, akreditasi, dan kolaborasi akademik baik di tingkat nasional maupun internasional. Perlindungan HKI memberikan legitimasi atas inovasi ilmiah yang dihasilkan oleh institusi, memperkuat citra akademik di mata masyarakat dan mitra kelembagaan, serta meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas penelitian yang dilakukan. Sebaliknya, rendahnya perlindungan HKI meski di tengah produktivitas publikasi yang tinggi justru mencerminkan

Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Karya Ilmiah Dosen: Analisis Yuridis Dalam Rangka Peningkatan Reputasi Akademik

kelemahan sistemik dalam manajemen penelitian dan pengelolaan hasil karya dosen. Berdasarkan temuan dari ketiga variabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan kekayaan intelektual harus ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem manajemen mutu perguruan tinggi. Institusi tidak hanya dituntut untuk mendorong dosennya agar produktif secara ilmiah, tetapi juga wajib memberikan fasilitas dan sistem pendampingan yang memadai agar setiap karya yang dihasilkan memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, reputasi akademik institusi akan terbentuk tidak hanya berdasarkan jumlah karya, tetapi juga atas dasar kualitas, keaslian, dan kepemilikan hukum yang sah terhadap karya tersebut.

5. Referensi

- Arrofah, G. A. P. "Penggunaan Chatgpt Dalam Pembuatan Karya Ilmiah Dosen Universitas Islam Indonesia Ditinjau Dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Maqāsid Syari'ah," 2024.
- Boli, Eril, and Muh Nur Hidayat M. "Agrarian Law Reform in Indonesia : Between Legal Certainty and Social Justice." *Indonesian Civil Law Review (ICLR)* 1, no. 1 (2025): 53–68. <https://ejournal.mgpublishing.co.id/index.php/iclr/article/view/5/6>.
- Darmawaty, Zainuddin, Asriadi. "Model for Fulfilling the Right to Work for Persons with Disabilities as an Effort to Protect the Law ." *Jurnal Hukum Volgeist* 9, no. 1 (2024): 1–7.
- Darwance, Darwance, Yokotani Yokotani, and Wenni Anggita. "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2020): 193–208. <https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1998>.
- Haekal, Andi Ahmad, Derriawan Derriawan, and Zulkifli Zulkifli. "Pengaruh Kinerja Dan Karakteristik Individu Serta Lingkungan Institusi Terhadap Produktivitas Publikasi Ilmiah Guna Mendukung Reputasi Universitas." *Excellent* 8, no. 1 (2021): 33–50. <https://doi.org/10.36587/exc.v8i1.885>.
- Hastia, andi azizah. "Dari Klik Ke Kontrak : Pertimbangan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Online." *Indonesian Civil Law Review (ICLR)* 1, no. 1 (2025): 37–52.
- Hijrah Lahaling, Arhjayati Rahim, Sumiyati Beddu, Dzikra Ridha Dwi Aribah, Saharuddin Saharuddin. "Legal Pluralism in the Tayade System: Reconciling Land and Plant Ownership Laws in Gorontalo." *Jurnal Ilmiah Al- Syir ' Ah* 23, no. 1 (2025): 1–17. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/jis.v23i1.3325>.
- Ilham. "Law Enforcement Against Gorontalo City Police Area Gambling Crime In." *Indonesian Civil Law Review (ICLR)* 1 (2025): 1–17. <https://ejournal.mgpublishing.co.id/index.php/iclr/article/view/1/4>.

*Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Karya Ilmiah Dosen: Analisis Yuridis
Dalam Rangka Peningkatan Reputasi Akademik*

- Nainggolan, B. "Buku Ajar Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi.," 56. Publika Global media, 2021. <http://repository.uki.ac.id/13970/1/BukuAjarPerananHukumdalamPembangunanEkonomi.pdf>.
- Nasadi, Irmawati, and Suhartin I Akdaji. "The Dynamics of Marriage in the Modern Era : Between Tradition and State Law." *Indonesian Civil Law Review (ICLR)* 1, no. 1 (2025): 69–83.
- Ramzy, Muhamad Javier, Upik Mutiara, Ronald Samuel Wuisan, and Rijal Ibnu Sani. "LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL INVESTMENTS." *Jurnal Hukum Volgeist* 8, no. 2 (2024): 148–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/volkgeist.v8i2>.
- Rosviana, Mohammad Irfan, Jl Perjuangan, By Pass, Kota Cirebon, and Jawa Barat. "Peningkatan Kemampuan Dosen Bidang Penelitian Pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Iain Syekh Nurjati Cirebon Improving the Ability of Lecturers in the Field of Research at the Faculty of Education and Teaching Iain Syekh Nurjati Cirebon." *JIEM (Journal of Islamic Education Management)* 8, no. 1 (2024): 30.
- Sahar, Saharuddin, Andi Suryaman M. Pide, Yunus Wahid, Muhammad Ilham Arisaputra, and Amilang. "Transfer of Land Rights in the Tayade System." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no. 1 (2025): 195–210. <https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.412>.
- Sinaga, Niru Anita. "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020): 150–51.
- SINTA kemendikbud. "Universitas Ichsan Sidenreng Rappang," 2025. <https://sinta.kemdikbud.go.id/affiliations/profile/8244297/?view=iprs>.
- Spiridiana, Yoaneta, Sorowea I Nyoman, Sukandia Desak, and Gde Dwi. "Kedudukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Pendahuluan." *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 3 (2024): 385–90.
- Tining Haryanti. "7 Tantangan Dan Harapan Dosen Di Indonesia," 1–166, 2025.
- Wibisono, Aryo Bayu. "Peran Desain Sistem Tanda (Sign System) Dalam Mendukung Reputasi Dan Kredibilitas Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Lingkup Perguruan Tinggi." *Gestalt: Jurnal Desain Komunikasi Visual* 6, no. 2 (2024): 98. <https://gestalt.upnjatim.ac.id/index.php/gestalt/article/view/136/6>.
- Winanti, Maya Anas Taqiyyah dan Atik. "Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Atas Tanah Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 5, no. 1 (2020): 79.